



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 229 /500.14/2025
TENTANG

PENYEBARAN LUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH
TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2020-2024 DALAM E-WALIDATA SISTEM
INFORMASI PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah diperlukan penguatan data dan informasi untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah dilakukan pemeriksaan data statistik sektoral berbasis elektronik pada E-Walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

b. bahwa sebagai dasar penyebarluasan data, pemanfaatan data, sekaligus mendukung Satu Data Indonesia, perlu ditetapkan data statistik sektoral daerah dengan Keputusan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah Tingkat Kota Pariaman Tahun 2020-2024 dalam E-Walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembarn Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENYEBARAN LUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2020-2024 DALAM E-WALIDATA SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH;

KESATU : Data Statistik Sektoral Daerah Tingkat Kota Pariaman Tahun 2020-2024 dalam E-Walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Data Statistik Sektoral Daerah Tingkat Kota Pariaman Tahun 2020-2024 dalam E-Walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah merupakan data hasil pemeriksaan Data Statistik Sektoral Daerah Kota Pariaman yang telah memenuhi ketentuan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.

KETIGA : Data Statistik Sektoral Daerah Tingkat Kota Pariaman Tahun 2020-2024 dalam E-Walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Kota Pariaman.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 29 Juli 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT /SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	17/9/2021
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEBERANTERAMAN RAKYAT	27/9/2021
KABAG HUKUM	26/8-25

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 229 /500.14/2025
TENTANG
PENYEBARAN LUASAN DATA
STATISTIK SEKTORAL DAERAH
TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN
2020-2024 DALAM E-WALIDATA
SISTEM INFORMASI PEMERINTAH
DAERAH

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2020-2024
DALAM E-WALIDATA
SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH

No.	Jenis Urusan	Jumlah Data	Perangkat Daerah Pengampu
1.	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	2.178	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
2.	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	931	Dinas Kesehatan
3.	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	593	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
4.	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	62	Dinas Perumahan Rakyat,Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
5.	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat	338	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	498	Dinas Sosial
7.	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	220	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Tenaga Kerja
8.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	205	Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
9.	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	250	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
10.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	609	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
11.	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	283	Dinas Perumahan Rakyat,Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
12.	Urusan Pemerintahan Bidang	61	Dinas Kependudukan dan

	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Catatan Sipil
13.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	78	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14.	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	360	Dinas Pemberdayan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
15.	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	1.293	Dinas Perhubungan
16.	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	310	Dinas Komunikasi dan Informatika
17.	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	82	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
18.	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	84	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
19.	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	81	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
20.	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	71	Dinas Komunikasi dan Informatika
21.	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	40	Dinas Komunikasi dan Informatika
22.	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	559	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
23.	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	235	Dinas Perpustakaan dan Arsip
24.	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	110	Dinas Perpustakaan dan Arsip
25.	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	39	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
26.	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	332	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
27.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	126	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
28.	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	116	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
29.	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	87	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
30.	Sekretariat Daerah	137	Sekretariat Daerah
31.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	134	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
32.	Perencanaan	190	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
33.	Keuangan	500	Badan Pengelolaan Keuangan

			dan Pendapatan Daerah
34.	Kepegawaian	90	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
35.	Penelitian dan Pengembangan	19	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
36.	Inspektorat Daerah	62	Inspektorat
37.	Kecamatan Administrasi	480	Kecamatan
38.	Kesatuan Bangsa dan Politik	58	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
JUMLAH		11.901	

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	13/2/2021
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEBELAKANGAN MASYARAKAT	23/2/2021
KABAG HUKUM	26/8/25
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	24/8-25